

Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan BUMDes Serta UMKM Desa Tonasa

Reskiyanti Nurdin^{1*}, Zulfiani Masud², Febrianto Syam³, Awal Muqsith⁴, Abu Bakar⁵
^{1,2,3,4,5}UIN Alauddin Makassar

*Corresponding author, e-mail: reskiyanti.nurdin@uin-alauddin.ac.id.

Abstrak

Kajian ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan BUMDes dan UMKM dengan kegiatan sosialisasi terkait BUMDes dan UMKM bagi masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Saat ini BUMDes hanya mengelola satu jenis usaha yakni pengisian air galon, untuk itu dengan sosialisasi dan pendampingan ini memberikan pengetahuan baru tentang potensi usaha yang bisa dikelola untuk BUMDes, khususnya dalam sector pertanian dan pariwisata. Kemudian pemilik UMKM diberikan pemahaman tentang bagaimana mengembangkan jenis usaha dengan cara kreatif, inovatif dan pemasaran digital. Metode sosialisasi dan konsultasi atas jenis usaha BUMDes dan UMKM ini diharapkan bisa membantu masyarakat berdampak bagi aspek peningkatan ekonomi desa. Hasilnya bisa membantu desa dalam mengidentifikasi jenis BUMDes yang bisa diupayakan dan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bisa menambah nilai dari usahanya.

Kata Kunci: BUMDes; Desa; Lembaga; UMKM.

Abstract

This study was conducted to empower the community through institutional strengthening of BUMDes and MSMEs with outreach activities related to BUMDes and MSMEs for the people of Tonasa Village, Tombolo Pao District, Gowa Regency. This activity is a form of community service carried out by the Political Science Study Program at UIN Alauddin Makassar. Currently BUMDes only manages one type of business, namely filling gallons of water. For this reason, socialization and mentoring provide new knowledge about business potential that can be managed for BUMDes, especially in the agricultural and tourism sectors. Then MSME owners are given an understanding of how to develop this type of business in creative, innovative and digital marketing ways. It is hoped that this socialization and consultation method for the types of BUMDes and UMKM businesses can help the community have an impact on aspects of improving the village economy. The results can help villages identify types of BUMDes that can be pursued and the community has the knowledge and skills to be able to add value to their business.

Keywords: BUMDes; Institution; UMKM; Village.

How to Cite: Asman, A. et al. (2023). Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan BUMDes Serta UMKM Desa Tonasa. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(3), 344-349.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2023 by author.

Pendahuluan

Tingkat pengangguran dan jumlah kemiskinan adalah persoalan yang saat ini masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dari data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia terhitung mencapai 9,77 juta orang di tahun 2020, jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 2,67 juta orang jika dibandingkan dengan skala yang sama tahun lalu (Andyanto 2021). Begitu pula dengan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga naik hingga 7,07 persen, jika dibandingkan dengan skala 2019, yang persentase TPT nya pada saat itu hanya sebesar 5,23 persen. Kemudian berdasarkan peta kewilayahan, tercatat bahwa jumlah pengangguran terbesar bermukim di perkotaan dengan jumlah TPT sebesar 8,98 persen dibanding di pedesaan, persentase TPT-nya berkisar 4,71 persen.

Ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan skala peningkatan jumlah pengangguran yang semakin tinggi di Indonesia, yaitu: (1) Jumlah masyarakat yang terbilang produktif dalam mencari kerja lebih besar dibanding dari jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Artinya, adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*). (2) terdapat kesenjangan antara keahlian yang dimiliki para pencari kerja dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Artinya adanya ketidakselarasan *ataumis-match*, (3) Sebagian besar anak yang putus sekolah dan atau lulusan yang tidak bisa melanjutkan studinya, tidak dapat bekerja atau terserap dan mudah masuk dalam dunia kerja karena, ini karena tidak adanya keterampilan atau pengalaman yang memadai (*unskill labour*), (4) Adanya pengangguran tersebut akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak lepas dari dampak krisis aglobal yang berkepanjangan, (5) Pemanfaatan sumber daya alam di pedesaan yang kurang optimal, (6) dampak dari pandemic covid-19 (Saepudin, et.al 2020).

Fenomena yang lain yang menjadi persoalan di lingkungan sosial adalah banyaknya masyarakat yang termasuk dalam kategori usia produktif sebagai pekerja di suatu pedesaan, tidak memiliki pekerjaan dan hanya menjadi pengangguran yang bersikap apatis dengan dunia pekerjaan (Suprihanto & Putri 2021). Selain itu, faktor kurangnya keterampilan dan tidak tersedianya wadah untuk mengembangkan minat bakat bagi masyarakat pedesaan juga menjadi permasalahan yang sekiranya perlu untuk diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Maka, tidak heran ketika masyarakat pedesaan kebanyakan melakukan urbanisasi ke kota dengan tujuan untuk mencari lapangan pekerjaan dan memiliki profesi yang mampu menopang kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Masyarakat pada kondisi seperti itu, biasanya hanya bekerja sebagai pegawai swasta, buruh bangunan, buruh pabrik dan asisten rumah tangga serta pekerjaan yang kategorinya informal.

Situasi tersebut, secara tak sadar membuat masyarakat mengenyampingkan peluang usaha dan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang jauh lebih menguntungkan ketika mereka berada di desa. Pada tataran ini, sebenarnya masyarakat pedesaan memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan hewani yang sangat menjanjikan. Potensi inilah yang kemudian dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

Potensi pengelolaan sumber daya alam yang ada di pedesaan perlu dimanfaatkan dan diolah dengan baik. Hal pertama yang mesti dilakukan untuk menjemput peluang ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif. Olehnya itu, masyarakat mesti dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus serta sosialisasi secara sistematis (Nur et al. 2014), dengan tujuan untuk melatih kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menciptakan terobosan baru di sektor ekonomi pedesaan yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam dengan menghasilkan suatu produk ekonomi yang baru dan menarik. Seperti di sektor makanan, karya kerajinan, pertanian, perkebunan dan sebagainya.

Untuk mengembangkan dan membangun pemikiran kreatif serta inovatif masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Maka, hadirilah organisasi atau lembaga yang secara fungsional membantu masyarakat Desa untuk mengembangkan ekonomi lokal serta ekonomi kreatif di dalam suatu pedesaan. Organisasi yang di maksud dalam tulisan ini adalah UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM merupakan bagian terbesar dalam perekonomian skala nasional dilihat dari indikator tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di sektor ekonomi (Ahmad, et.al 2022). Pengendalian UMKM dalam perputaran laju ekonomi selama ini terbukti sebagai klep pengaman di masa krisis, dengan melalui berbagai mekanisme penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini berarti memperkuat bisnis perekonomian dalam masyarakat pula (Saepudin et.al 2020).

Salah satu lembaga atau perangkat naungan pemerintahan yang memiliki tupoksi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat serta memiliki prinsip pengabdian sosial adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dalam tulisan ini, akan membahas bagaimana peran dan kehadiran Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Wilayah Desa Tonasa berada sekitar 94 km sebelah timur Kabupaten Gowa dikenal dengan kawasan lumbung sayur-mayur. Kawasan ini sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Masyarakat tinggal di Desa Tonasa umumnya memiliki karakteristik dan kondisi ekonomi yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kota yang sudah padat akan penduduk. Masyarakat di desa ini melakukan usaha pertanian karena dari segi geografis wilayahnya masih banyak lahan pertanian. Kepemilikan lahan pertanian oleh petani padi di Desa Tonasa rata-rata kurang dari “sebagian” atau lahan pertanian. Luas wilayah Desa Tonasa kurang lebih 21,25 km² yang terdiri dari 4,25 km² pemukiman, 10,66 km² pertanian serta sisanya hutan dan lahan budidaya. Karena faktor jarak dengan pusat kabupaten terkadang para petani menaikkan harga panennya demi menutupi biaya transportasi dan terkadang murah karena faktor ketidakseimbangan produksi dan permintaan pasar.

Komoditas utama pertanian di Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa adalah tanaman sayur-sayuran. Selain sayuran, terdapat juga komoditas lain seperti padi, singkong, dan buah-buahan. Mayoritas masyarakat adalah petani karena petani merupakan profesi turun temurun dengan pewarisan lahan pertanian. Pihak pemerintah Desa Tonasa menyadari mereka mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian, maka dari itu pemerintah Desa Tonasa selalu berupaya memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang bertujuan positif bagi sektor pertanian melalui Bumdes. Pendirian dan pengembangan Bumdes tidak lepas dari upaya percepatan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian Bumdes yang terdapat di Desa Tonasa dalam menggerakkan usaha berbasis pertanian masih mengalami kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu Desa Tonasa dijadikan sebagai desa mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa Tonasa melalui pengembangan hasil usaha rumahan.

Kehadiran Prodi Ilmu Politik di Desa Tonasa adalah untuk melakukan kerja sama pengabdian kepada masyarakat di Desa itu dalam hal pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kinerja tersebut akan diawali dengan pemberian sosialisasi, pendidikan, pelatihan yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan ide dan skill yang kreatif serta inovatif bagi masyarakat Desa Tonasa. Tujuan pengabdian ini adalah untuk membantu peningkatan ekonomi pedesaan dan membantu masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi, kemudian membantu terciptanya lapangan kerja strategis bagi masyarakat Desa Tonasa. Sehingga, dengan adanya program pengabdian ini, perluasan lapangan kerja dan peningkatan skill masyarakat di sektor ekonomi dapat terbantu. Selain itu, kegiatan ini juga akan membantu masyarakat Desa Tonasa memiliki pekerjaan yang menguntungkan dan tentu meraut keuntungan yang baik serta dapat menambah penghasilan masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Dalam hal penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes dan UMKM, Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar melakukan sosialisasi terkait BUMDes dan UMKM tersebut di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa pada tanggal 17 Juni 2022. Dalam pelaksanaannya, seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik serta beberapa mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini.

Sesuai dengan observasi awal tim, melalui pengembangan ekonomi kreatif masyarakat menengah ke bawah seperti pengusaha pemula dan ibu rumah tangga menjadi target utama dalam kegiatan ini. Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor Desa Tonasa dihadiri oleh para staf Desa serta masyarakat setempat khususnya pelaku UMKM. Metode sosialisasi dilakukan dengan pemberian materi dan sharing session antara pemateri dan audiens.

Adapun capaian yang menjadi target dalam kegiatan ini adalah mengacu pada permasalahan mitra Desa, antara lain: Termotivasinya para pengusaha pemula dalam mengembangkan bisnisnya melalui usaha ekonomi kreatif, termotivasinya para ibu rumah tangga dalam memanfaatkan waktu luang untuk menciptakan produk-perодук usaha yang dapat menambah nilai komoditi yang dapat ditawarkan oleh usaha ekonomi kreatif yang berada di bawah naungan BUMDes serta terwujudnya BUMDes yang lebih aktif, inovatif dan kreatif dalam mewujudkan mitra Desa melalui pengembangan ekonomi yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Kemudahan akses keuangan masyarakat dapat direpresentasikan melalui keberadaan lembaga keuangan masyarakat. Kemudian penguatan kelembagaan serta pemberdayaan BUMDes dan UMKM menjadi salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat Desa. Sehingga beberapa masalah terkait pendapatan masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao dapat diselesaikan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada BUMDes dan UMKM.

Identifikasi Masalah BUMDes dan UMKM

Berdasarkan observasi di lapangan, Desa Tonasa yang kaya akan sumber daya alam sayur-sayuran ternyata masih memiliki beberapa masalah di sektor perekonomian terkait tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari belum cukup optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan dan pengembangan usaha/bisnis. Sehingga pelaksanaan sosialisasi BUMDes dan UMKM difokuskan untuk menambah wawasan masyarakat terkait cara-cara pengembangan usaha serta membangkitkan semangat kerja sama antara pemerintah Desa dan masyarakat setempat.

Dan secara singkat, setelah melakukan sosialisasi terkait BUMDes dan UMKM di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao dengan melalui diskusi dan *sharing session* dan dengan berbagai penggalan

informasi ternyata hasil dari sosialisasi BUMDes dan UMKM yang telah dilaksanakan Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, antara lain sebagai berikut:

- a) Masyarakat Desa Tonasa belum banyak memahami bagaimana cara pengembangan usaha/bisnis;
- b) Pengurus BUMDes belum benar-benar memahami tugas pokoknya sesuai dengan struktur yang ada; dan
- c) Kurang terjalannya koordinasi antara staf inti Desa dan pengurus BUMDes.



Gambar 1. Sosialisasi BUMDes dan UMKM Sosialisasi BUMDes dan UMKM

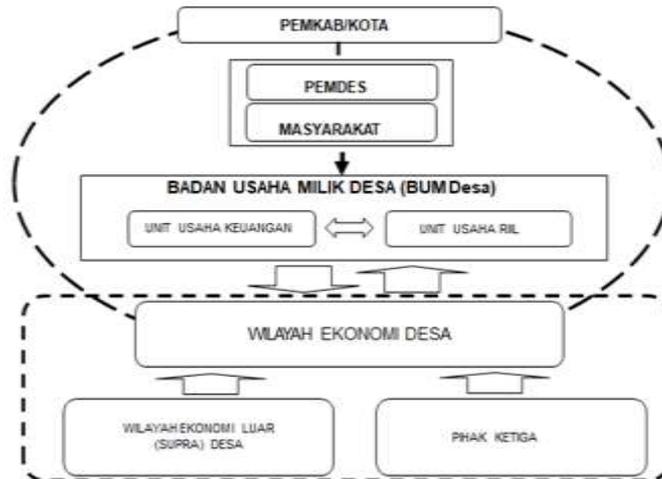
Pelaksanaan pengabdian masyarakat Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar adalah dengan menerapkan program Desa binaan di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao. Sasaran yang diproyeksikan dalam pengabdian itu adalah dengan mengembangkan pemanfaatan potensi BUMDes dan UMKM di Desa tersebut. Agenda program kerja yang dilakukan adalah dengan menggandeng masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menggaet para Ibu rumah tangga di Desa Tonasa. Elemen tersebut, dibekali dengan pemberian pendidikan dan peningkatan wawasan melalui kegiatan sosialisasi terkait pemanfaatan dan pengelolaan BUMDes dan organisasi-organisasi usaha yang ada di bawah naungannya. Olehnya itu, pada bagian ini akan dibahas mengenai filosofis, manajemen dan teknis BUMDes serta UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 6, dijelaskan bahwasannya BUMDes merupakan Badan usaha yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui keikutsertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset desa, jasa bantuan/pelayanan kepada masyarakat serta usaha lainnya yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun Pembentukan BUMDes menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 88 menyatakan bahwa BUMDes dibentuk melalui musyawarah dan disepakati secara bersama-sama oleh masyarakat. Sementara itu, di dalam pasal 87 ayat 2, pengelolaan BUMDes dilakukan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, kemudian pada pasal 3 BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum sesuai dengan ketentuan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari penjelasan tersebut, BUMDes memiliki beberapa tujuan di antaranya: Memajukan perekonomian Desa; (a) mengoptimalkan aset dalam Desa, (b) mengembangkan usaha masyarakat, (c) menumbuhkan semangat rencana kerja, (d) menciptakan peluang serta jaringan pasar, (e) membuka lapangan kerja, (f) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (g) meningkatkan/memaksimalkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pada tahap pengimplementasiannya, tidak sedikit BUMDes yang mengalami persoalan berujung pada kegagalan lembaga tersebut beropreasi di masyarakat. Penyebab terjadinya masalah itu yakni, (1) pendirian BUMDes hanya formalitas, (2) Pemilihan unit usaha yang asal-asalan tanpa menguasai bidang yang dipilih, (3) BUMDes hasil Duplikasi Model terbawa Arus Tren dan Viral, (4) Pemilihan karyawan atau rekan kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan BUMDes (5) Pengelola BUMDes bekerja dengan tidak fokus.

Adapun strukturasi model penguatan ekonomi Desa melalui peran BUMDes dapat kita lihat pada bagan di bawah ini:



Bagan.1 Model Penguatan Ekonomi Desa Melalui Peran BUMDes

Dari bagan di atas dapat dipahami jika badan utama dari BUMDes digawangi oleh pemerintah Kabupaten/Kota, kemudian diproyeksikan kepada Pemerintah Desa (PEMDES), selanjutnya diperuntukkan bagi masyarakat. Masyarakatlah kemudian yang mengambil kendali serta memainkan banyak peran di BUMDes, mereka diberi kebebasan untuk mengekspresikan ide dan keterampilannya dalam mengelola produk sumber daya alam, maupun produk kreatif dan inovatif lainnya. Prospek kerja dari lembaga usaha ini adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kondisi ekonominya.

Dalam menjalankan bidang usaha, baik usaha ekonomi maupun pelayanan umum, BUMDes mendapatkan bantuan dana hibah atau akses permodalan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemerintah Desa. Selanjutnya, berdasarkan amanat dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa unsur pemerintah mengawal jalannya BUMDes dengan melakukan berbagai pendampingan teknis dan akses pasar beserta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa (Saptawan et al. 2022).

Di dalam BUMDes, terdapat organisasi-organisasi usaha turunan yang kemudian dijadikan sebagai representasi pemerintah Desa dalam memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan dan mengembangkan suatu usaha yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam pedesaan. Klasifikasi organisasi turunan BUMDes berdasarkan aturan pada pasal 7 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu BUMDes terdiri dari badan-badan usaha yang berbadan hukum, lembaga berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang sahamnya dimiliki oleh BUMDes dan masyarakat.

Secara spesifik BUMDes tidak dapat disamakan layaknya badan hukum lain seperti perseroan terbatas, koperasi, CV dan lainnya. Karenanya, BUMDes merupakan suatu badan usaha yang bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan segala kegiatannya selain untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes).

Potensi sumber daya alam yang dikembangkan melalui BUMDes dan organisasi usaha yang ada di bawahnya adalah berada pada sektor pengelolaan hasil perkebunan, usaha jasa dan perdagangan, hasil pertanian, pasar Desa, usaha industri rumahan dan usaha hasil peternakan. Hadirnya BUMDes ini adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masyarakat yang ada dalam suatu Desa.

Untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes, maka diperlukan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki kapasitas ide, ilmu pengetahuan dan skill yang mumpuni. Untuk menopang hal tersebut, salah satu lembaga yang dapat memberikan pengawalan untuk memberikan ilmu, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang akan digarap oleh BUMDes dan organisasi-organisasi usaha kecil yang ada di bawahnya, yakni lembaga pendidikan dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan hidup, salah satu tupoksi PTN maupun PTS adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bukti nyata keterlibatan PTN dalam pengabdian masyarakat adalah terlibatnya Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar dalam menggarap program Desa binaan di Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao. Progres yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Politik adalah menggaet para pelaku usaha-usaha kecil dan ibu rumah tangga di Desa tersebut, kemudian diberikan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Tonasa. Dasar program kerja tersebut adalah memanfaatkan hasil perkebunan, yakni mengolah sayur-sayuran masyarakat yang telah dipanen menjadi sebuah bahan makanan atau produk

pangan dan pengembangan usaha kecil lainnya yang telah digaungi oleh masyarakat Desa Tonasa sehingga dapat memiliki nilai jual yang baik dan tentunya dapat menambah penghasilan masyarakat. Dan yang utama adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya pemasaran digital untuk pelaku UMKM sebagai bentuk transformasi penjualan dari transaksi langsung menjadi produk dan jasa yang layak jual di berbagai platform *marketplace*.

Evaluasi Hasil dan Capaian

Setelah dilaksanakannya sosialisasi ini, pertemuan berikutnya adalah mendiskusikan hasil dari kegiatan. Masyarakat mendapat banyak informasi dan pengetahuan baru. Untuk para stakeholder Desa Tonasa, kepala desa memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini, karena memberikan input bagi desa untuk bisa berinovasi akan hal baru untuk bidang penjualan yang bisa dikembangkan sebagai pemasukan untuk dana desa. Alasannya, berangkat dari kegelisahan anggota BPD yang melihat kegagalan BPD dalam mengembangkan pendapatan dari dana desa melalui kegiatan barang dan jasa yang sifatnya produktif.

Kemudian untuk pelaku UMKM, mampu memberikan pencerahan atas usaha jualannya yang selama ini masih menggunakan konsep marketing secara tradisional. Sebagai peserta sosialisasi, dengan adanya kesempatan untuk bisa saling mendiskusikan usaha yang sedang dijalankan, memberikan rasa percaya diri dan pengalaman baru untuk bisa membuat usaha menjadi lebih baik, khususnya dalam kemasan produk dan penjualan berbasis digital. Segmentasi jualan kepada siapa menjadi penting untuk kebutuhan bahan baku. Masing-masing pelaku usaha menyadari bahwa kekurangan atas usahanya mendapatkan *feedback* dari adanya kegiatan sosialisasi.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao dalam penguatan dan pemberdayaan BUMDes dan UMKM melalui sosialisasi diproyeksikan sebagai alternatif dalam memberikan pemahaman yang meluas kepada masyarakat terakait pengelolaan BUMDes dan pengembangan usaha-usaha kecil yang digaungi oleh masyarakat di sana. Maka penguatan kelembagaan serta pemberdayaan BUMDes dan UMKM menjadi salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat Desa. Sehingga beberapa masalah terakit pendapatan masyarakat Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao dapat diselesaikan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM dan BUMDes. Adapun target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah mengacu pada permasalahan mitra Desa, antara lain: Termotivasinya para pengusaha pemula dalam mengembangkan bisnisnya malalui usaha ekonomi kreatif, termotivasinya para ibu rumah tangga dalam memanfaatkan waktu luang untuk menciptakan produk-produk usaha yang dapat menambah nilai komoditi yang dapat ditawarkan oleh usaha ekonomi kreatif yang berada di bawah naungan BUMDes serta terwujudnya BUMDes yang lebih aktif, inovatif dan kreatif dalam mewujudkan mitra Desa melalui pengembangan ekonomi yang ada.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. R., Tohopi, R. & Radji. L. (2022). Pengembangan BUMDes Dan UMKM Bagi Masyarakat Desa Dulohupa Dan Desa Monggolito Kecamatan Boliyohuto. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(1), 423–43.
- Andyanto, S. (2021). Tingkat Pengangguran Sampai 2, 56 Juta Orang, Kepala BPS: Imbas Pandemi Covid-19. <https://bisnis.tempo.co/read/1444706/tingkat-pengangguran-sampai-2-56-juta-orang-kepala-bps-imbaspandemi-covid-19>.
- Nur, M., Syawal, F., Hafied, I. & Iskandar, S. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa). *Accounting Journal*, 1(13), 184–89.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes
- Saepudin, A., Kamarubiani, N. & Shantini, Y. (2020). Pengembangan Desa Binaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kab.Bandung Barat). *E-Coops-Day Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 41-48.
- Saptawan, A., Junaidi, J. Ermanovida, E. & Susilowati, R. (2022). Mapping the Economic Potential of MSMEs to Develop the BUMDes Business. *Community Empowerment*, 7(4), 673–83.
- Suprihanto, J. & Putri, L.P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. November. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.